

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*. (Diakses: 10 Maret 2018).
- _____. (2016). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016*. (Diakses: 09 Maret 2018).
- _____. (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*. (Diakses: 09 Maret 2018).
- _____. (2017). *Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*.
- Bastian, I. (2014). *Audit Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Jakarta: Salemba Empat.
- Budiyono. (2013). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Fiat Justisia*, 7(1).
- Feriyanti, M., Hermanto, H., & Suransi, N. K. (2015). Determinan Kepatuhan Pada Ketentuan Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal InFestasi*, 11(2), 171-185.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi Kedelapan). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE) Maret 2015*, 22(1), 25-33.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Jurnal of Accounting and Public Policy*, 1-26.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1-11.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Keempat). Yogyakarta: ANDI.

Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2016). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Journal Info Artha, 1*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945*.

_____. (1973). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.

_____. (1999). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.

_____. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

_____. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.

_____. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

_____. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

_____. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

_____. (2014). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*.

_____. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

_____. (2014). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*.

_____. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum*.

Sekaran. (2014). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Edisi Keempat)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170.
- Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1), 45-62.
- Silfia, R., Meihendri, M., & Yuniilma, Y. (2015). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Sumatera Barat periode 2010-2013). *E-Journal Universitas Bung Hatta*, 6(1).
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Suhardjanto, D., & Yuliningtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1), 1-94.
- Syoftia, E., Puspa, D. F., & Ethika. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Kumpulan Artikel Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Wisuda Ke 66*. 9(1).
- Syofyan, E. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah. *Kumpulan Executive Summary Mahasiswa Prodi Akuntansi Wisuda Ke 68*. 11(1).
- www.bpk.go.id
- www.kpu.go.id
- www.puskapol.ui.ac.id
- Yunara, D., Puspita, D. F., & Herawati, H. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study Pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat). *E-Journal Universitas Bung Hatta*, 8(1).